

## Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Hikmahanzio<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [hikmahanzio@gmail.com](mailto:hikmahanzio@gmail.com)<sup>1</sup>, [padmonowibowo@gmail.com](mailto:padmonowibowo@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pelaksanaan hukuman pidana pada seorang pelanggar hukum dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan agar mereka dapat menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah mereka lakukan serta dapat menjadi manusia yang berguna ketika kembali pada masyarakat. Oleh sebab itu, suatu program pembinaan narapidana diciptakan sebagai media untuk melatih, mengasah dan mengajarkan mereka berbagai kemampuan dan ilmu sehingga tujuan dari pemidanaan dapat terwujud. Pada pelaksanaannya, beberapa permasalahan muncul pada proses pembinaan yang tidak berjalan sehingga terhambatnya proses pembinaan pada Lembaga pemasyarakatan sering terjadi. Permasalahan seperti SDM yang kurang berkualitas, kelengkapan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hingga alokasi anggaran yang tidak sepadan dengan kegiatan yang dilakukan mengakibatkan proses pembinaan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan program pembinaan melalui Diagram Fishbone. Setelah mengidentifikasi penyebab yang terjadi permasalahan pada causal faktor, tahap selanjutnya yaitu membuat rencana atau rekomendasi dari akar penyebab yang ada agar bisa diimplementasikan dengan benar dan efektif. Berbagai rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan solusi dan terti terang akan suatu permasalahan yang terjadi akan keberlangsungan program pembinaan terhadap narapidana.

**Kata Kunci:** *Pembinaan; Diagram Fishbone; Lembaga Pemasyarakatan*

### Abstract

The implementation of criminal penalties for lawbreakers in the Correctional Institution is carried out so that they can realize their mistakes for the actions they have committed and can become useful human beings when they return to society. Therefore, a prisoner coaching program was created as a medium to train, hone and teach them various abilities and knowledge so that the purpose of sentencing can be realized. In practice, several problems arise in the coaching process that does not work so that the delay in the coaching process at the correctional institution often occurs. Problems such as low-quality human resources, completeness of facilities and infrastructure, excess capacity to budget allocations that are not commensurate with the activities carried out have resulted in this coaching process not going according to what was planned. Therefore, in this study discusses the problems that exist in the process of implementing the coaching program through the Fishbone Diagram. After identifying the cause of the problem with the causal factor, the next step is to make a plan or recommendation from the existing root cause so that it can be implemented correctly and effectively. These various recommendations are expected to provide solutions and shed light on a problem that occurs in the sustainability of the coaching program for prisoners.

**Keywords:** *Coaching; Fishbone Diagrams; Penitentiary*

### PENDAHULUAN

Dalam proses sosial masyarakat, seseorang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membangun kehidupan sosialnya masing-masing. Kehidupan bermasyarakat memerlukan norma dan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat di dalamnya. Yang mana sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu, perilaku masyarakat Indonesia tidak akan terlepas dari hukum. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi masyarakat terbanyak di dunia. Hal tersebut menyebabkan tingkat kriminalitas masyarakat Indonesia lebih tinggi dibanding negara lainnya. Atas dasar itu, tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum

dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa dengan pidana denda, sosial maupun pidana penjara yang akan dijalankan para proses peradilan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. selain itu, pemasyarakatan sendiri sebagai hilir dari terlaksananya sistem hukum dalam Criminal Justice System yang menjadi bahan akhir terlaksananya suatu pemulihan hidup pelaku tindak pidana. Selain itu diperjelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, tujuan pidana yang berupa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas”(Anis Widyawati 2020).

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam membentuk dan merubah kepribadian seseorang yang menyimpang dan sebelumnya melakukan suatu pelanggaran hukum menjadi lebih paham akan nilai-nilai agama, norma dalam masyarakat. Sebelum menjadi seperti sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan telah bertransformasi dari kepenjaraan dengan sistem kolonial mengadopsi masa penjajaran belanda, berubah menjadi Pemasyarakatan yang digagas oleh menteri kehakiman pada masa itu Dr, Sahardjo tahun 1963 yang merupakan tonggak awal berdirinya sistem pemasyarakatan hingga saat ini. berubahnya nama menjadi pemasyarakatan juga mengubah keseluruhan sistem dari kepenjaraan yang mencerminkan perilaku Deterens menjadi Pemasyrakatan dengan segala bentuk aktifitas yang menekankan terpenuhinya segala Hak Asasi Manusia dan juga menekankan perubahan sikap dan tingkah laku bari para pelanggar hukum.

Untuk itu, pelaksanaan pidana penjara ini lebih mengedepankan pemulihan sifat dan sikap narapidana melalui berbagai program pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana yang sejatinya mengharapkan terjadinya perubahan besar pada diri mereka agar mampu menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan baru mereka setelah bebas nantinya. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan ini diakui menerima banyak sekali persoalan yang dapat mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pemberian bekal kehidupan dan penghidupan bagi narapidana. Keselarasan akan kondisi sarana dan prasarana, integritas pegawai, ketersediaan dana serta dukungan dari warga binaan sendiri merupakan beberapa faktor untuk menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan pembinaan.

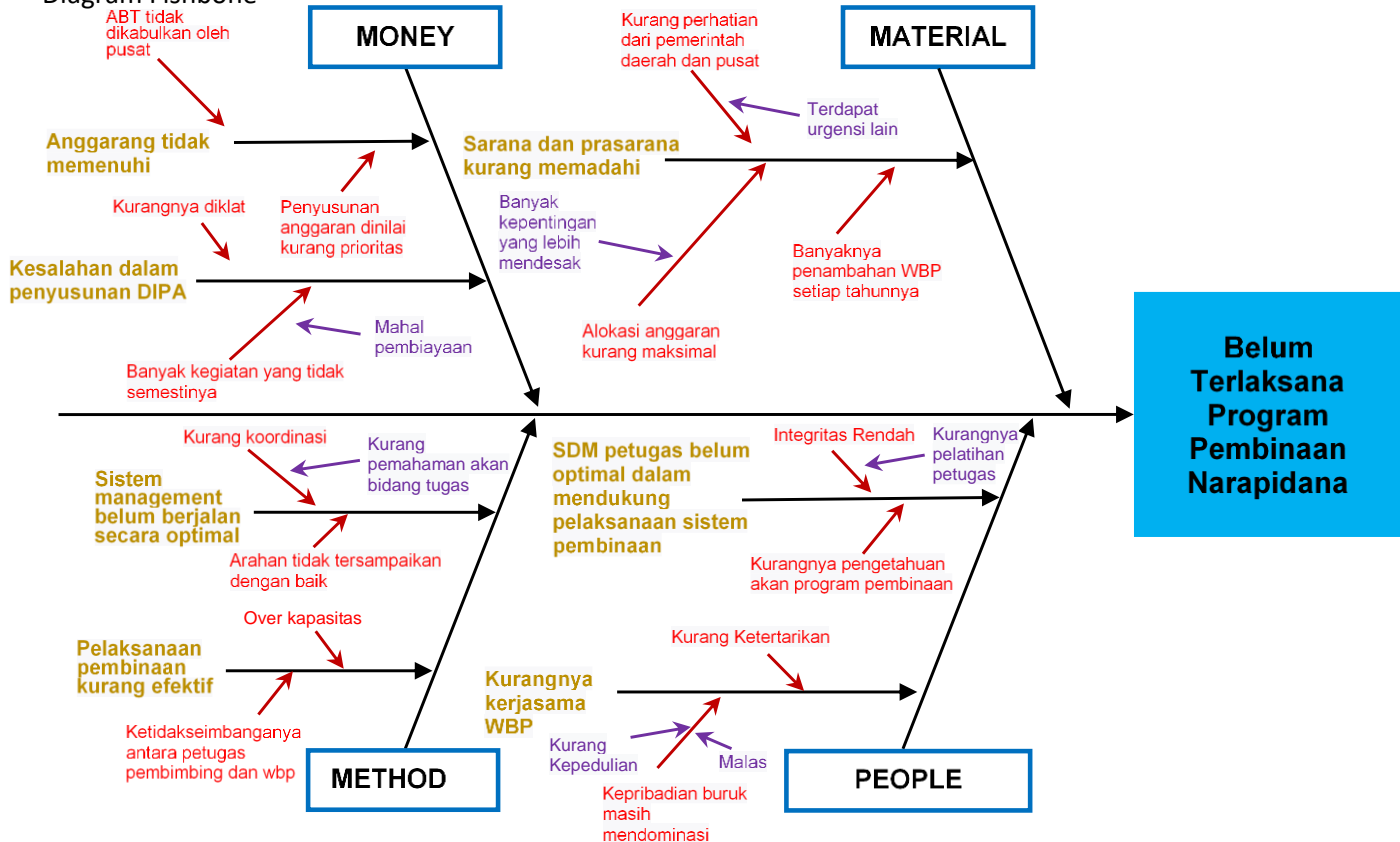
Untuk itu, penelitian ini akan membahas berbagai macam persoalan yang kerap terjadi dan menjadi permasalahan usang dalam proses terlaksananya kegiatan pembinaan pada UPT Pemasyarakatan Indonesia yang berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam penyelenggara tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana melalui diagram Fishbone.

## **METODE**

Studi ini menggunakan metode kualitatif dalam mendeskripsikan korelasi antara kausal dengan variabel-variabelnya dan mempelajari dinamika hubungan antar faktor-faktor resiko dengan efek yang ditimbulkan menggunakan cara metode pendekatan, observasi lapangan atau pengumpulan data pada satu waktu atau bisa juga disebut dengan *point time approach* (Citrawan 2015).Proses dalam pengumpulan data menggunakan cara observasi dengan melakukan pengamatan dan mengeksplorasi data data dilapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dengan mencari dari beberapa sumber sekunder dengan bentuk data-data dari instansi terkait dan wawancara terkait sinkronisasi data yang telah dikumpulkan. Observasi dilakukan dengan mencari informasi langsung kepada orang-orang yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagram Fishbone



Keterangan

- Penyebab
- Permasalahan
- Akar Permasalahan
- Detail Akar Permasalahan

**PENENTUAN TOP EVEN FTA**

**Top Even FTA Material**  
**Tabel 1.1**

Top Event FTA	Basic Event Fishbone
Sarana dan prasarana kurang memadai	Banyaknya penambahan WBP setiap tahunnya
	Alokasi anggaran kurang maksimal
	Kurang perhatian dari pemerintah daerah dan pusat

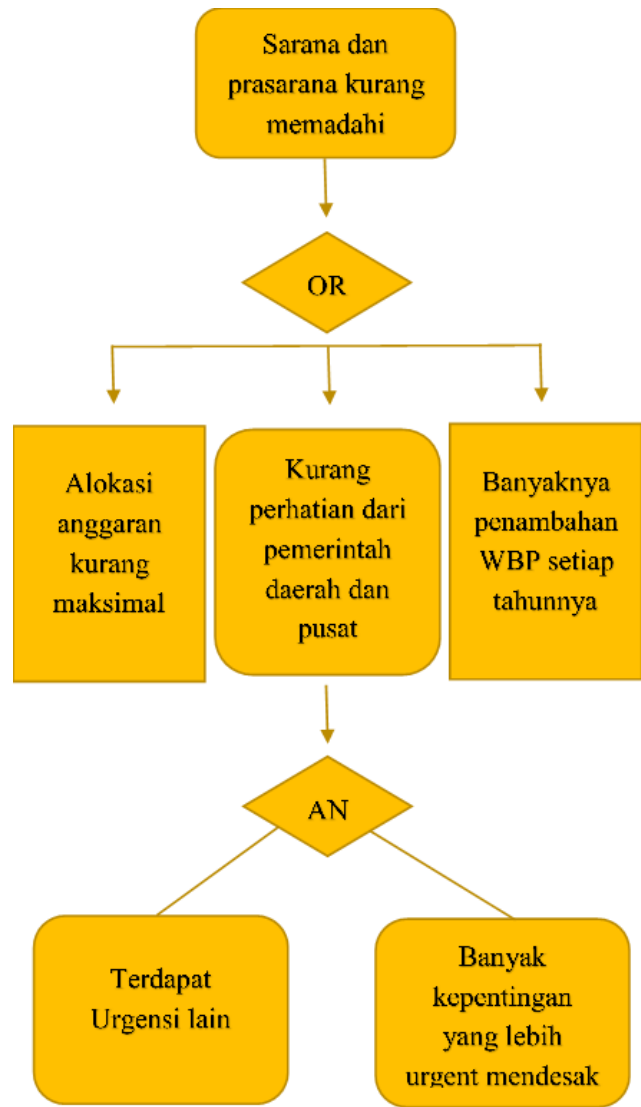
**Top Even FTA People**  
**Tabel 1.2**

Top Event FTA	Basic Event Fishbone
SDM petugas belum optimal dalam mendukung pelaksanaan sistem pembinaan	Integritas Rendah
	Kurangnya pengetahuan akan program pembinaan
	Kurang Ketertarikan

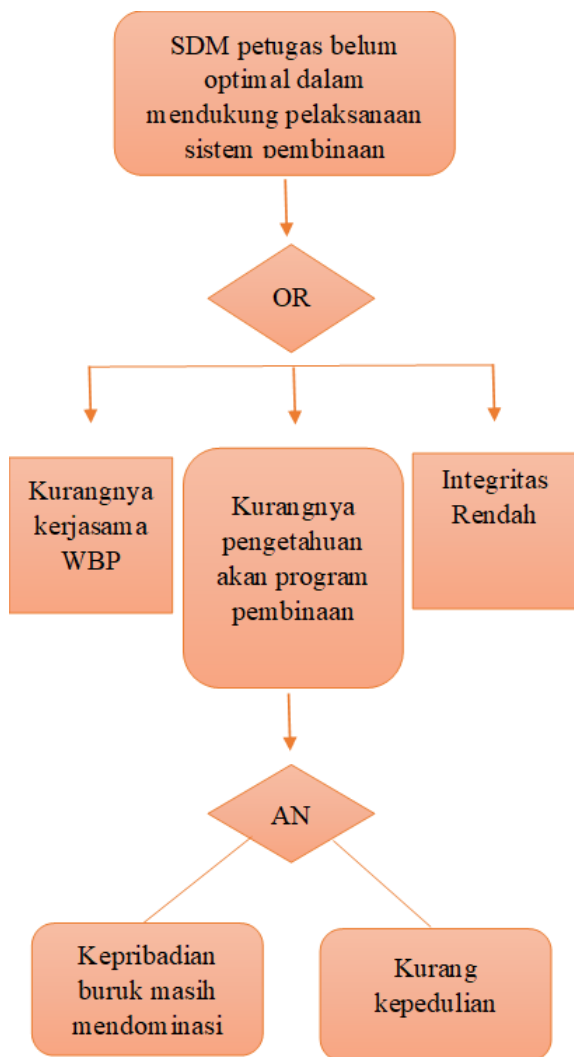
**Top Even FTA Money**  
**Tabel 1.3**

Top Event FTA	Basic Event Fishbone
Anggarang tidak memenuhi	Penyusunan anggaran dinilai kurang prioritas
	ABT tidak dikabulkan oleh pusat
	Banyak kegiatan yang tidak semestinya

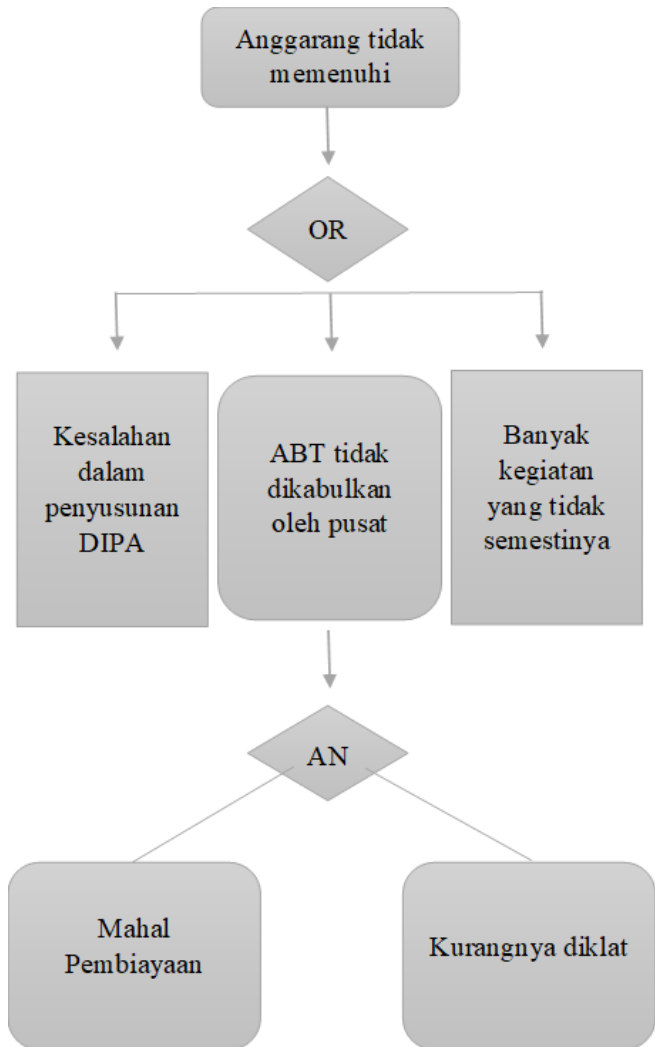
**DIAGRAM HASIL AKHIR FAULT TREE**



Gambar 2.1  
Diagram Hasil Akhir Fault Tree Sarana dan prasarana kurang memadai



Gambar 2.2  
Diagram Hasil Akhir Fault Tree SDM petugas belum optimal dalam mendukung pelaksanaan sistem pembinaan



Gambar 2.3  
Diagram Hasil Akhir Fault Tree Anggaran tidak memenuhi



Gambar 2.4  
Diagram Hasil Akhir Fault Tree Sistem managemen belum berjalan secara optimal

## REKAP DATA BASIC EVEN

Tabel 2.1  
Rekap Data Basic Event

No	Top Event	Penyebab/Basic event
1	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kurang perhatian dari pemerintah daerah dan pusat
		Alokasi anggaran kurang maksimal
		Banyaknya penambahan WBP setiap tahunnya
		Banyak kepentingan yang lebih urgent mendesak
2	SDM petugas belum optimal dalam mendukung pelaksanaan sistem pembinaan	Kurangnya kerjasama WBP
		Integritas Rendah
		Kurangnya pengetahuan akan program pembinaan
		Kepribadian buruk masih mendominasi
3	Anggarang tidak memenuhi	Kesalahan dalam penyusunan DIPA
		Banyak kegiatan yang tidak semestinya
		ABT tidak dikabulkan oleh pusat
		Kurangnya diklat
4	Sistem management belum berjalan secara optimal	Ketidakseimbangannya antara petugas pembimbing dan wbp
		Arahan tidak tersampaikan dengan baik
		Pelaksanaan pembinaan kurang efektif
		Kurang pemahaman akan bidang tugas

Tabel 3.1  
Rekap Data Permasalahan

Penyebab	Permasalahan	Akar Permasalahan	Detail akar Permasalahan	Strategi Yang diterapkan
Material	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kurang perhatian dari pemerintah daerah dan pusat	Terdapat Urgensi lain	Melakukan kerjasama atau MoU dengan pihak ke-3
		Banyaknya penambahan WBP setiap tahunnya		Pemindahan WBP yang telah vonis inkrah secara berkala
		Alokasi anggaran kurang maksimal	Banyak kepentingan yang lebih urgent mendesak	Pemanfaatan anggaran tahun lalu Melakukan penghematan akan kegiatan yang kurang penting dilaksanakan
People	SDM petugas belum optimal dalam mendukung pelaksanaan sistem pembinaan	Integritas Rendah	Kurangnya pelatihan petugas	Melakukan diklat serta pendidikan akan tugas dan kewajiban
	Kurangnya kerjasama WBP	Kurangnya pengetahuan akan program pembinaan		Melakukan pelatihan serta sosialisasi akan bidang tugas yang akan diemban
		Kurang Ketertarikan	Kurang kepedulian Malas	Pendekatan emosional oleh petugas
	Kepribadian buruk masih mendominasi		Pemberian motivasi dan semangat dalam berubah	
Money	Anggaran tidak memenuhi	ABT tidak dikabulkan oleh pusat		Melakukan perencanaan secara matang akan suatu kebutuhan prioritas
		Penyusunan anggaran dinilai kurang prioritas		Koordinasi dengan pusat atau pemerintah daerah dalam alokasi anggaran
	Kesalahan dalam penyusunan DIPA	Kurangnya diklat		Mengadakan pelatihan dan pengajaran akan kesesuaian dalam penyesuaian anggaran
Banyak kegiatan yang tidak semestinya		Mahal pembiayaan	Melakukan evaluasi akan kegiatan yang tidak bermanfaat sebaiknya ditiadakan	
Method	Sistem management belum berjalan secara optimal	Kurang koordinasi	Kurang pemahaman akan bidang tugas	Melakukan koordinasi dan evaluasi kerja
		Arahan tidak tersampaikan dengan baik		Menjalankan komunikasi dengan baik dengan Pejabat Struktural secara intensif dan para staff
	Pelaksanaan pembinaan kurang efektif	Ketidakseimbangannya antara petugas pembimbing dan wbp		Melakukan perekrutan petugas pasyarakat melalui pusat dengan mengedepankan integritas
		Over kapasitas		Kebijakan dari pusat

## SIMPULAN

Permasalahan terhadap belum terlaksana program pembinaan terhadap narapidana pada diagram fishbone didapati hasil :

Hasil susunan penyebab permasalahan / tulang besar yang menjadi fokus tidak terlaksananya suatu program pembinaan dari diagram fishbone

- Material : Sarana dan prasarana kurang memadai
- People : SDM petugas belum optimal dalam mendukung pelaksanaan sistem pembinaan
- Money : Anggaran tidak memenuhi
- Method : Sistem management belum berjalan secara optimal

Berikut merupakan permasalahan utama dalam masing-masing aspek yang telah dipetakan pada diagram fishbone. Pada permasalahan utama, terdapat tulang-tulang kecil yang menjadi akar terciptanya suatu permasalahan besar pada belum terlaksana program pembinaan terhadap narapidana. Rekomendasi yang diberikan dilakukan untuk menjadi harapan agar permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widyawati, Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Depok: RAJAWALI PERS.
- Citrawan, Harison. 2015. "Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan." *Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Harsono, HS. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djembatan, Jakarta.
- Rian, Ririn Astria. 2018. "PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang)." : 90.